

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan *corporate governance*, manajemen laba dan nilai perusahaan. Penelitian pertama dilakukan oleh Suranta dan Midiastuty (2003) yang membuktikan hubungan struktur kepemilikan manajerial, nilai perusahaan dan investasi dengan model persamaan linier simultan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara struktur kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan linier dan negatif. Indikasinya adalah kepemilikan manajerial mempengaruhi nilai perusahaan dan hubungannya adalah linier dimana semakin tinggi kepemilikan manajerial akan semakin menurunkan nilai perusahaan. Sedangkan hubungan antara kepemilikan manajerial dan investasi tidak dapat ditentukan hubungannya, akan tetapi kepemilikan manajerial mempengaruhi investasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non- keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 1994-2000.

Siallagan dan Machfoedz (2006) membuktikan hubungan antara mekanisme *Corporate Governance*, kualitas laba dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, komite audit mempengaruhi kualitas laba. Semakin besar kepemilikan manajerial dan adanya komite audit dalam perusahaan maka *Discretionary Accrual* semakin rendah (*Discretionary Accrual* yang rendah maka kualitas laba tinggi). Kualitas laba yang

mempengaruhi nilai perusahaan, *Discretionary Accrual* memiliki hubungan yang negatif dengan nilai perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit dan auditor mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka nilai perusahaan semakin rendah, dewan komisaris dan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan serta KAP yang tergabung dalam BIG Two akan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 74 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2000-2004. Pengambilan sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling*.

Iqbal (2007) dalam (Purwandari, 2011) membuktikan *Corporate Governance* sebagai alat pereda praktek manajemen laba. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Corporate Governance* yang meliputi kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional, dewan direksi dan komite audit secara serentak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Namun, secara individual, tidak semua mekanisme *Corporate Governance* menunjukkan konfirmasi positif. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 60 perusahaan yang telah *Go Public* dan terdaftar di bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2000-2006. Pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*.

Untuk meringkas dari hasil penelitian diatas, peneliti membuat tabel ringkasan hasil penelitian yang terdapat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Peneliti (tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	Herawaty (2008)	GCG, <i>Earnings management</i> , Nilai perusahaan	Manajemen laba berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan jika tidak memasukkan variabel <i>corporate governance</i> . Sebaliknya manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika mempertimbangkan variabel <i>corporate governance</i> .
2	Suwandi (2007)	<i>Earnings management</i> dan nilai perusahaan	Variabel <i>earnings management</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3	Suranta dan Midiastuty (2003)	Kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan	Hubungan antara struktur kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan linier dan negatif.
4	Siallagan dan machfoedz (2006)	Mekanisme <i>good corporate governance</i> , kualitas laba, dan nilai perusahaan	Kepemilikan manajerial, komite audit mempengaruhi kualitas laba. Kualitas laba yang mempengaruhi nilai perusahaan, <i>discretionary accrual</i> memiliki hubungan yang negatif dengan nilai perusahaan.
5	Iqbal (2007)	<i>Corporate governance</i> sebagai alat pereda praktek manajemen laba	<i>Corporate governance</i> yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi dan komite audit secara serentak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *Corporate Governance* dan *Earnings Management*. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan agen (Jensen dan Meckling 1976) dalam (Purwantini, 2008), *Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor mengendalikan para manajer (Herawaty, 2008).

2.3. *Good Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Herawaty, 2008). Sedangkan Isgiyarta dan Triatiarini (2005), mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Esensi *Good Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, serta komite audit independen. *Good corporate governance* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga terciptanya mekanisme *check and balance* di perusahaan.

Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan-perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam *good corporate governance*. *Good corporate governance* menurut Yona (2008) diperlukan dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing bagian dalam perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham.

3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.3.1. Aspek Penting dari *Good Corporate Governance*

Sari (2008) menyatakan bahwa ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni : (1) Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal). (2) Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal). Diantaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. (3) Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan

informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. (4) Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang menyampaikan informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

2.3.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Terdapat empat prinsip dalam *good corporate governance* yaitu sebagai berikut :

2.3.2.1. *Transparency* (keterbukaan)

Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan.

Praktek yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang terkait dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga

perlu untuk menyampaikan kepada seluruh pihak struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi.

2.3.2.2. *Fairness* (kewajaran)

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktek kecurangan (*fraud*) dan praktek-praktek *insider trading*.

2.3.2.3. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajibannya.

Praktek-praktek yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas, diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengangkatan komisaris independent merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

2.3.2.4. Responsibility (responsibilitas)

Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *Good Corporate Governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya.

Responsibilitas juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Keputusan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sangsi, baik sangsi hukum maupun sangsi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka.

2.3.3. Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam industri perbankan

Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi internal dan eksternal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam, keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) dibidang perbankan.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.penerapan *Good Corporate Governance* menjadi suatu keniscayaan mengingat sector perbankan mengelola dana publik (nasabah) (Setiawan dan Nasution, 2007).

2.4. Manajemen Laba

Copeland (1968) mendefinisikan manajemen laba sebagai “*some ability to increase or decrease reported net income at will*” yang berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen.

Menurut (Scott, 1997) manajemen laba dibagi menjadi dua, pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak utang, dan *political costs (opportunistic earnings management)*. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari *perspektif efficient contracting (Efficient earnings management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Apabila manajemen laba bersifat oportunistik, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor. Cara mendeteksi ada tidaknya manajemen laba dalam perusahaan yaitu melalui pengukuran atas akrual, merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu (1) *non discretionary accruals* adalah bagian akrual yang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan (2) *discretionary accrual* adalah bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi.

2.5. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan. (Sujoko dan Soebiantoro, 2007) menyatakan nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya, harga saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga tinggi. Harga saham yang tinggi merupakan dampak dari adanya jumlah permintaan yang besar (hukum penawaran) menunjukkan besarnya keyakinan dan kepercayaan investor untuk menambahkan modal pada suatu perusahaan.

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967) dalam (Herawaty, 2008). Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi incremental. Jika rasio-q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika rasio-q dibawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik.

Jadi rasio-q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomis dalam kekuasaanya. Penelitian yang dilakukan oleh Copeland (2002), Lindenberg dan Ross (1981) yang dikutip oleh Darmawati (2004), menunjukkan bagaimana rasio-q dapat diterapkan pada masing-masing perusahaan. Mereka menemukan bahwa beberapa perusahaan dapat mempertahankan rasio-q yang lebih besar dari satu. Teori ekonomi mengatakan bahwa rasio-q yang lebih besar dari satu akan menarik arus sumber daya dan kompetisi baru sampai rasio-q mendekati satu. Seringkali sukar

untuk menentukan apakah rasio-q yang tinggi mencerminkan superioritas manajemen atau keuntungan dari dimilikinya hak paten.

Rasio yang dinilai dapat memberikan informasi paling baik adalah Tobin's Q, karena rasio ini dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, misalnya terjadi perbedaan *crosssectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi, hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan, hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan dalam akuisisi, dan kebijakan pendanaan, deviden, dan kompensasi. Nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q dapat dihitung dengan cara nilai pasar dari ekuitas (yang diperoleh dari perkalian harga saham penutupan (akhir tahun) dengan jumlah saham yang beredar (akhir tahun) dijumlah dengan total hutang dibagi dengan total asset.

2.6. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.6.1. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris. Selain mensupervisi dan member nasihat pada dewan direksi sesuai dengan yang

dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 dalam (Setiawan dan Nasution, 2007) adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan memepertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris telah dilakukan diantaranya Peasnell, Pope, dan Young (1998) dalam (Nasution dan Setiawan, 2007) meneliti efektifitas dewan komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan selama periode 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba.

(Xie, dkk, 2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka Akrua kelolaan (*discretionary accrual*) perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrua kelolaan (*discretionary accrual*).

Penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris di Indonesia juga banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik *Corporate Governance* terhadap manajemen laba. Praktik *Corporate Governance* yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini

adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *Corporate Governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Beasley (1996) dalam Nasution (2007) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih penting untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit. Analisis lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan juga berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

H_{1a} : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba

2.6.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan

komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit ini berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit diantara lain

1. Melakukan pengkajian atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan pengkajian atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan pengkajian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan pengkajian dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Penelitian oleh (Veronica dan Bachtiar, 2004) dalam (Setiawan dan Nasution, 2007) menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan yang signifikan dengan akrual kelolaan (*discretionary accrual*) perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya untuk periode 2001-2002, artinya kehadiran komite audit

secara efektif menghalangi peningkatan manajemen laba di perusahaan tersebut. (Veronica dan Bachtiar, 2004) juga meneliti pengaruh interaksi dari persentase komite audit dengan akrual disresioner, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya koefisien positif yang signifikan dalam hubungan antara reaksi pasar dan interaksi antara komite audit dan akrual disresioner. Hal ini membuktikan bahwa pasar menilai positif akrual kelolaan perusahaan yang memiliki komite audit yang diindikasikan dengan tingginya *return* perusahaan.

H_{1b} : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba

2.6.3. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding pemilik (pemegang saham) sehingga menimbulkan asimetri informasi. Manajer diwajibkan memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan merupakan cerminan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi pengguna eksternal perusahaan karena kelompok itu berada dalam kondisi yang paling tidak tinggi tingkat kepastiannya (Ali, 2002).

Asimetri antara manajemen dan pemilik memberikan kesempatan pada manajer untuk melakukan *earnings management* untuk meningkatkan nilai perusahaan pada saat tertentu sehingga dapat menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai nilai perusahaan sebenarnya. (Sloan, 1996) dalam (Herawaty, 2008) menguji sifat kandungan informasi komponen akrual dan komponen aliran kas apakah terefleksi dalam harga saham. Terbukti bahwa kinerja laba yang

berasal dari komponen akrual sebagai aktifitas *earnings management* memiliki persistensi yang lebih rendah dibanding aliran kas. Laba yang dilaporkan dari aliran kas operasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan saat ini.

Herawaty (2008) menguji peran praktek *Corporate Governance* sebagai variabel *Moderating* dari pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Abbas (2012) menguji pengaruh manajemen laba dan *Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan : studi empiris perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang artinya manajemen laba dapat meningkatkan nilai perusahaan perbankan.

H₂ : Manajemen laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.6.4. Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dalam komisaris inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Karena dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris juga harus memantau efektifitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan perseroan, serta melakukan penyesuaian bilamana

diperlukan. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif (Lastari, 2004).

Charlie Weir, *et al*(2000) dalam (Wulandari, 2006) menganggap komisaris yang independen sama dengan direktur non-eksekutif. Ada peran yang memediasi hubungan antara manajer, auditor dan pemegang saham. (Fama dan Jensen, 1983) dalam (Wulandari, 2006) menyatakan bahwa *non-excecutive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance*.

H_{3a} : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel *intervening*

2.6.5 Komite Audit berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening

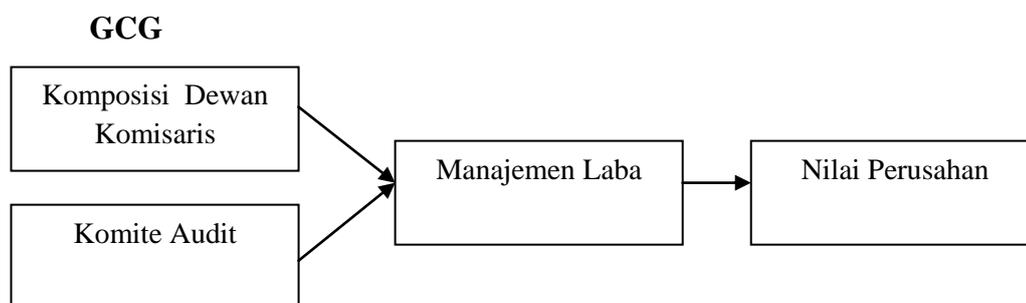
Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa investor, analisis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Komite audit juga berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan

perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektivitas dari auditor. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi.

Riduwan dan Verdana sari (2010) variabel komite audit mempunyai nilai signifikansi 0.081, dapat dikatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan kawatu (2009) dan Herawaty (2008) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H_{3b} : Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel *intervening*

2.7. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual, dapat dijelaskan bahwa manajemen laba dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan (*agency teory*) yang dipicu adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan pengelola/manajemen perusahaan (*agent*). Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih dahulu

daripada pemegang saham sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntansi pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu, sehingga mengakibatkan laba yang dilaporkan semu yang menyebabkan nilai perusahaan berkurang dimasa yang akan datang. Oleh karena perusahaan melakukan pengawasan melalui mekanisme *Good Corporate Governace* (komposisi dewan komisaris dan komite audit) untuk meminimumkan masalah manajemen laba